

PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Era Inziaj MZ

erainziajmz@gmail.com

Universitas Muhammadiyah
Jember

Norita Citra Yuliarti

norita@unmuhjember.ac.id

Universitas Muhammadiyah
Jember

Gardina Aulin

gardinaaulinnuha@gmail.com

Universitas Muhammadiyah
Jember

ABSTRACT

Situbondo Regency, which is located in Situbondo City at the easternmost tip of East Java Province, was established in 1972 and adopted the motto "Bumi Sholawat Nariyah" (Land of the Living Gods) as its official slogan. Awards such as the Top Leader on Digital Implementation award, Top Digital Implementation Level Stars 4, and Top CIO on Digital Implementation at the 2021 Top Digital Awards show that Situbondo Regency is able to spread its wings and fly so far. Information technology is a major factor affecting government efficiency. Information technology refers to the practice of using technological resources effectively. When properly planned and implemented, IT-supported information systems can increase firm value (Nasir and Oktari, 2011). The government's efforts to establish a statewide tertiary information management system and network linking institutions with similar IT infrastructure are mandated by Section 79 of the Rhode Island Act No. 12 of 2012 concerning the Development of Higher Education. There can be no growth, accountability or transparency in government without the use of information technology to facilitate the generation and processing of data with greater speed and efficiency. The second thing that influences organizational performance is internal control.

Keywords : Government , Information Technology , Internal, Control, Performance.

1. PENDAHULUAN

Terminologi kinerja merupakan bagian integral dari proses saat ini yang terlibat dalam membangun tata kelola yang baik. Pemerintah, berdasarkan statusnya sebagai institusi sektor publik, berkewajiban untuk mempromosikan standar pelayanan tertinggi dan efisiensi dan efektivitas internal melalui alokasi yang tepat dari sumber daya pemerintah. Sesuai dengan pasal 1 no. 37 Permendagri No. 13 Tahun 2006, kinerja adalah kuantitas dan kualitas hasil kegiatan dan program yang terukur dalam

kaitannya dengan alokasi sumber daya. Untuk mengukur sejauh mana perusahaan telah berhasil mewujudkan visinya melalui operasinya dan untuk mengukur keuntungan dan kerugian dari kebijakan operasional tertentu, penting untuk mengukur dan melacak kinerja dan menyebarluaskan data tersebut kepada pemangku kepentingan yang sesuai. Jika pemerintah memiliki akses ke data tentang seberapa baik kinerja suatu lembaga, pemerintah dapat melakukan penyesuaian kebijakan, mengoordinasikan fungsi utamanya,

meningkatkan kapasitasnya untuk perencanaan strategis, dan mengukur seberapa sering dapat mencapai konsensus mengenai hal-hal penting. Sejak 2011 (Nasir dan Oktari). Untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan, seperti merevisi kebijakan dan menyelaraskan kegiatan utama organisasi dengan tugas utamanya, sangat penting bagi organisasi untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang situasi dan data mengenai tingkat pencapaian hasil dan dampak positif dan negatifnya. dampak kebijakan operasional.

Baik teknologi informasi dan pengendalian internal memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas di organisasi mana pun. Ada perbedaan antara TI dan pengendalian internal fisik, tetapi TI dapat digunakan sebagai alat untuk merampingkan yang terakhir. Ini tidak berarti bahwa pengendalian internal tidak dapat dilaksanakan tanpa TI; sebaliknya, itu dapat dilakukan, tetapi dengan TI akan lebih mudah untuk mencapai tujuan tertentu yang sulit dicapai secara manual. Untuk alasan ini, TI harus digunakan untuk semua aspek pengendalian internal. Beberapa sarjana telah meneliti apa yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas lembaga pemerintah (Chintya, 2015). Menurut temuan studinya, sistem pengendalian internal dan teknologi informasi memiliki hubungan positif yang mempengaruhi seberapa baik kinerja instansi pemerintah. Senada dengannya, Rahadi (2007) yang senada dengan Jayanti (2008) menegaskan bahwa teknologi informasi sangat

penting untuk meningkatkan pelayanan publik. Temuan serupa juga terlihat pada penelitian lain. Menurut penelitian Laksamana (2002), kinerja manajerial dan teknologi informasi saling bergantung.

Teknologi informasi merupakan faktor utama yang mempengaruhi efisiensi pemerintahan. "Teknologi informasi" mengacu pada praktik penggunaan sumber daya teknologi secara efektif. Ketika direncanakan dan diimplementasikan dengan baik, sistem informasi yang didukung TI dapat meningkatkan nilai perusahaan (Nasir dan Oktari, 2011). Upaya pemerintah untuk membangun sistem manajemen informasi tersier di seluruh negara bagian dan jaringan yang menghubungkan institusi dengan infrastruktur TI serupa diamanatkan oleh Pasal 79 Undang-Undang Rhode Island No. 12 Tahun 2012 tentang Pengembangan Pendidikan Tinggi. Tidak akan ada pertumbuhan, akuntabilitas, atau transparansi dalam pemerintahan tanpa penggunaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pembuatan dan pemrosesan data dengan kecepatan dan efisiensi yang lebih tinggi.

Hal kedua yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi adalah pengendalian intern. Menurut *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA), sebagaimana dikutip dalam Wilopo (2006: 349), pengendalian internal sangat penting karena melindungi bisnis dari kekeliruan karyawan manusia dan mencegah mereka melakukan

tindakan ilegal atau tidak pantas. Sistem Pengendalian Intern didefinisikan oleh Perpres No. 60 Tahun 2008 sebagai “proses integral” dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh karyawan untuk memastikan organisasi mencapai tujuannya melalui operasi yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, pengamanan kekayaan negara, dan kepatuhan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang terkait. Kontrol internal dan manajemen yang lebih baik adalah dua bidang yang akan menguntungkan lembaga pemerintah mana pun. Elemen dan sub-elemen dari sistem pengendalian internal, seperti

Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Sistem Pengendalian Internal, memungkinkan badan pemerintah untuk memverifikasi bahwa sistem melayani tujuannya dan mencapai tujuannya. Setiap tindakan yang diambil oleh departemen atau badan pemerintah mana pun akan dievaluasi sesuai dengan seberapa baik kontribusinya terhadap tujuan keseluruhan departemen atau badan tersebut, serta seberapa baik pegawainya melakukan pekerjaan mereka dan seberapa baik pemerintah secara keseluruhan melakukan tugasnya. Nasir dan Oktari (2011) menemukan korelasi positif antara pengendalian internal dan keluaran instansi dengan kinerja TI pada satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Kampar. Pengukuran kinerja tersebut

luas di Indonesia karena diwajibkan oleh undang-undang. BaikUU No. 28 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah maupun TAP. MPR No. IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih mempersyaratkannya.

Akuntansi kota dengan menggunakan basis akrual diperkenalkan pertama kali pada tahun 2014. Dalam rangka penerapan sistem SAP berbasis akrual di tingkat kota, Peraturan Menteri No. 64 Tahun 2013 menetapkan fasilitas akuntansi berupa pedoman. Bagan Akun Standar (BAS), Pedoman Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), dan lainnya hanyalah beberapa topik yang dibahas dalam panduan ini. Setiap pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi wajib mengikuti aturan ini saat menyampaikan laporan keuangan berbasis akrual kepada konstituennya (Mentu dan Sondakh, 2016). Pasal 18 UUD 1945 mengamanatkan pembentukan pemerintahan daerah, dan dari keharusan itu muncul sejumlah undang-undang dan perbuatan hukum lain yang mengatur di tingkat kotamadya. Pembentukan daerah terutama dilatarbelakangi oleh keinginan meningkatkan pelayanan publik sebagai sarana untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat dan sebagai sarana untuk memfasilitasi pendidikan politik masyarakatluas.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan asas pemerintahan adalah yang dimaksud dengan "Pemerintahan Daerah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. kebebasan yang sebesar-besarnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan yang dituangkan dalam Undang-Undang Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah di Indonesia berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Anggota pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, atau walikota, serta perangkat daerah. Dengan demikian pemerintah daerah bertanggung jawab atas segala tindakan yang tepat yang diambil atas nama otonomi daerah, yang diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di lingkungan sesuai dengan hukum.

Obyek penelitian ini adalah pemerintah daerah, pada pemerintah daerah Kabupaten Situbondo, Pemilihan lokasi penelitian dikarenakan Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas, namun

sejauh ini belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menginformasikan berbagai keputusan manajemen (misalnya yang menyangkut evaluasi kinerja, penyempurnaan perencanaan, dll).

2. KAJIAN TEORI

Good Governance

Pengertian *good government governance* Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengatakan itu murni dan berwibawa, menunjukkan tata kelola yang baik. *Asian Development Bank* menggambarkan "*goverment*" sebagai "*administrasi pemerintahan*" dengan empat karakteristik yang menentukan: akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan prediktabilitas. *Governance* adalah, menurut *United Nation Development Program* (UNDP), menjalankan Notoritas politik, ekonomi, dan administratif atas semua aspek urusan negara. Untuk tujuan pembangunan sosial dan ekonomi, Bank Dunia mendefinisikan "*governance*" sebagai cara negara mengarahkan sumber dayanya.

Menurut BPK(2003), Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi adalah tiga landasan *good governance*. Kebijakan, proses pengambilan keputusan, dan hasil dari memberlakukan dan menegakkan kebijakan tersebut semuanya harus terbuka untuk umum sebagai prinsip yang dikenal sebagai "transparansi". Bertanggung jawab berarti menjawab atau menjelaskan kinerja seseorang

atau kinerja kepemimpinan perusahaan atau organisasi kepada seseorang yang memiliki kedudukan hukum atau moral untuk menuntutnya. Sementara itu, partisipasi memastikan bahwa semua warga memiliki suara dalam pembuatan kebijakan, baik secara langsung maupun melalui organisasi pihak ketiga yang sah yang menyuarakan kepentingan terbaik mereka. Untuk mendapatkan partisipasi semacam ini, orang harus dapat dengan bebas bergaul satu sama lain, mengekspresikan diri, dan mengambil bagian dengan cara yang produktif.

Teori *stewardship* adalah kerangka kerja untuk memahami bagaimana manajemen didorong untuk bekerja menuju tujuan kepala sekolah. Penatalayanan didasarkan pada gagasan bahwa manajemen tidak selalu dimotivasi oleh kepentingan pribadi. Namun, ada kasus di mana satu-satunya tujuan manajemen adalah meningkatkan utilitasprinsipal (An Ras Try Astuty, 2019). Menurut Hernandes (2008) yang dikutip dari Riny Jefri (2018), pengertian dari teori *stewardship* adalah sebuah sikap atau perilaku seseorang yang mengutamakan kesejahteraan kelompok di atas kepentingan jangka pendek sendiri. Struktur organisasi yang membantu para pemimpin dalam menjalin hubungan baik di antara karyawan dan dengan komunitas yang lebih besar adalah bibit dari mana kepengurusan berkembang. Pengikut dapat terinspirasi untuk bertindak secara

moral dalam pelayanan organisasi jika strategi dan motivasi di belakang organisasi cukup kuat.

TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi adalah jaringan komputer dan perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, dan jaringan informasi terkait, seperti yang didefinisikan oleh O'Brien (2006: 28). Informasi, sebagaimana didefinisikan oleh Aji (2005:6), adalah "data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga sifatnya telah diubah menjadi data lain yang bermanfaat". Di era globalisasi ini, di mana teknologi informasi berkembang dengan kecepatan yang memusingkan, bidang pendidikan pasti akan terpengaruh. Agar dapat mengikuti tuntutan global, maka dunia pendidikan harus terus menerus menyesuaikan kemajuan teknologi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, proses pembelajaran khususnya akan mendapat manfaat dari adaptasinya dengan konteks pendidikan

Tujuan proyek ini adalah menghasilkan data berkualitas tinggi, yang didefinisikan sebagai data yang tepat waktu dan akurat, termasuk konteks pribadi dan profesional, teknologi informasi dapat dianggap sebagai alat untuk mengolah data dengan berbagai cara. informasi untuk pembuatan kebijakan pemerintah dianggap sebagai aset strategis. Komputer digunakan untuk memproses data, komputer dihubungkan bersama sesuai

kebutuhan melalui jaringan, dan telekomunikasi digunakan untuk membuat data yang diproses tersedia secara luas.

PENGENDALIAN INTERNAL

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012), pengendalian internal adalah “suatu proses yang dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain dari suatu entitas untuk memberikan jaminan menyeluruh atas pencapaian keandalan, efektivitas, dan pelaporan laporan.” memaksimalkan produktivitas sambil tetap sejalan dengan hukum. Pengendalian internal didefinisikan sebagai setiap kebijakan, proses, atau prosedur yang dilakukan dalam suatu entitas oleh dewan direksi, manajemen, atau personel lain yang dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, kemanjuran dan efisiensi operasi, dan perlindungan aset perusahaan.

KINERJA PEMERINTAH

Kinerja adalah fakta yang harus diketahui dan dikomunikasikan kepada khalayak tertentu untuk menilai sejauh mana tujuannya telah tercapai dalam visi yang dinyatakan dan untuk mengukur keuntungan dan kerugian dari setiap keputusan yang

dibuat mengenai operasinya. Indikator input, output, outcome, benefit, dan impact digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja. Mengukur kinerja memerlukan identifikasi KPI dan tujuan yang relevan, serta mengumpulkan data tentang kinerja aktual untuk dianalisis. Mengukur kinerja membantu memastikan bahwa inisiatif dan rencana berada di jalur yang tepat untuk mencapai hasil yang diharapkan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif bahwa penelitian kuantitatif biasanya digunakan dalam studi yang bertujuan untuk membuktikan hipotesis, memberikan bukti argumen, atau menggambarkan banyak aspek dari suatu topik sekaligus. Analisis deskriptif dengan menggunakan metode survei mencirikan jenis penelitian ini. Lokasi penelitian ini yaitu Jl. Pb. Sudirman No.1, Plaosan, Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312

HASIL PENELITIAN

Setelah dilakukan pembagian kuesioner Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nauap *et al* (2016), Setiawaty *et al* (2017), Aamran (2020), Cholis & Fadli (2018), Amiruddin & Rafika (2019) menunjukkan bahwa Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kinerja instansi. Proses mendalam atas tindakan dan aktivitas yang dilakukan

INSTANSI

secara terusmenerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai merupakan tulang punggung sistem pengendalian intern organisasi yang keberhasilannya bergantung padanya (PP No. 71 Tahun 2010). Agar kontrol dapat diterapkan secara efektif, setiap orang yang terlibat harus berkomitmen penuh terhadap proses tersebut.

4. SIMPULAN

Kesimpulan ini dapat ditarik dari hasil dan pembahasan, yakni sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah Kabupaten Situbondo.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah Kabupaten Situbondo.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Supriono. (2005). Pengantar Teknologi Informasi. Semarang : Salemba Infotik.
- Arens A. Alvin. Ellder j. Ronald & Beasley Mark s. (2008). Auditing dan jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi. Jakarta: Erlangga.
- Baharudin, R. (2010). Keefektifan Media Belajar Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi.
- Tadrîs, 5(1), 112–127.
- Bangun, Wilson. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Erlangga.
- Chintya, I. (2015) ‘Pengaruh Teknologi informasi dan Sisitem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Solok (Studi pada SKPD Kota Solok)’, *Jurnal Akuntansi*, 3(1), pp. 1–14.
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBMSPSS 26, Edisi 10. In Semarang, Universitas Diponegoro Indonesia, R. (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah.
- Indra Bastian, P. D. (2019). Lingkup Akuntansi Sektor Publik. Lingkup Akuntansi Sektor Publik.
- Mahsun, Mohammad. 2014. Pengukuran Kinerja Sektor Publik Edisi Pertama. Cetakan kelima. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.